



LAMPIRAN

Lampiran

Laporan Wawancara dengan Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Hari/Tanggal : Senin, 24 September 2018

Pukul : 12.30 WIB

Tempat : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa

Tengah

Narasumber : Agus Supriyanto, Sekretaris PPID Utama

DPUBINMARCIPKA Pemprov Jateng

Pewawancara : Elva Visoladilla Indi Scorvir

Menurut Sekretaris PPID tugas PPID (menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2015) yaitu; Mengklasifikasikan informasi berdasar 4 kategori informasi (informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta – merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan), Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya, Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik, Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya, Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya, Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat, Melakukan inventarisasi informasi

yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama dan Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Beliau mengatakan bahwa layanan PPID di dinas tersebut diberlakukan sejak tahun 2015. Selama ini layanan PPID di dinas tersebut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Undang – Undang (UU) Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perihal struktur terbaru PPID dan Surat Keputusan (SK) 2018 susah ditetapkan dan bisa diperoleh.

Menurut beliau, Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2018 disediakan dan setiap tahun ditetapkan. Ditemukan adanya kendala layanan PPID yakni bahwa *update* data di situs sering terlambat karena keterbatasan tenaga. Selama ini 4 kategori informasi di dinas tersebut sudah dianggap mencantumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 dan tidak ditemukan kendala dalam prosesnya.

Dinyatakan oleh beliau bahwa belum tercantumnya struktur PPID dan Tugas PPID di situs karena masih dalam proses pengembangan dan akan segera dilengkapi.

Lampiran

Laporan Wawancara dengan Staf PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Oktober 2018

Pukul : 14.30 WIB

Tempat : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Narasumber : Bapak Mufti Agung, Sekretaris PPID DINKES Pemprov
Jateng

Pewawancara : Elva Visoladilla Indi Scorvir

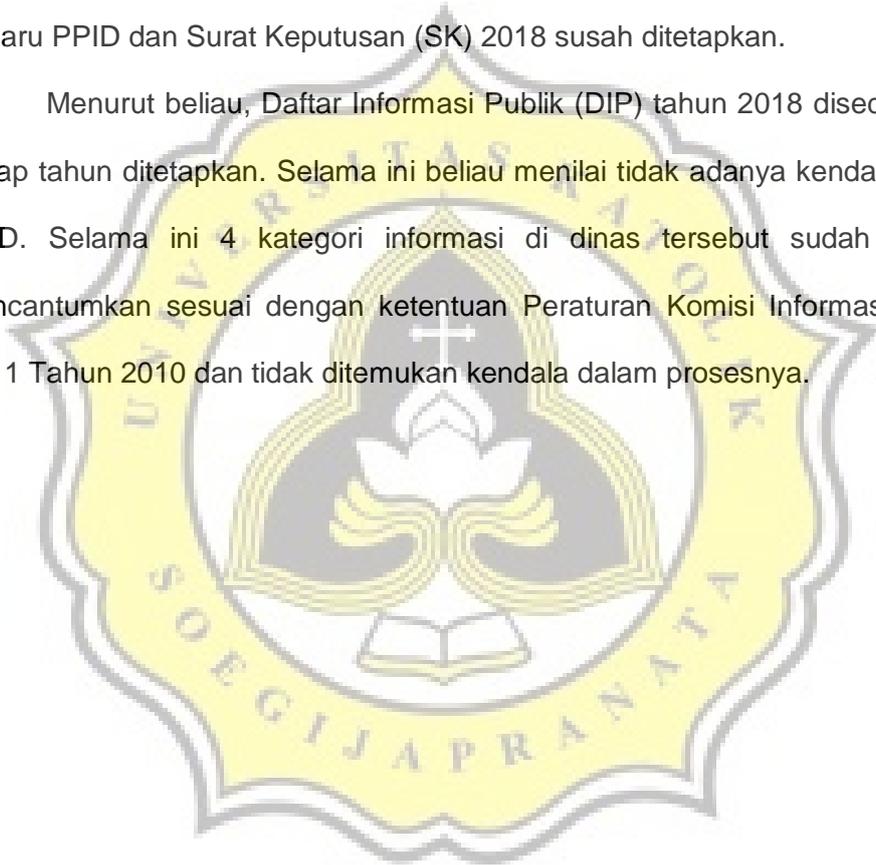


Menurut Mufti Agung, tugas PPID (menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2015) yaitu; Mengklasifikasikan informasi berdasar 4 kategori informasi (informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta – merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan), Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya, Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik, Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya, Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya, Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat, Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama dan Memberikan

laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Beliau mengatakan bahwa layanan PPID di dinas tersebut diberlakukan sejak tahun 2012. Selama ini layanan PPID di dinas tersebut dinilai lancar dan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ditemukan adanya kesalahan dalam proses, maka segera dilakukan perbaikan. Perihal struktur terbaru PPID dan Surat Keputusan (SK) 2018 susah ditetapkan.

Menurut beliau, Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2018 disediakan dan setiap tahun ditetapkan. Selama ini beliau menilai tidak adanya kendala layanan PPID. Selama ini 4 kategori informasi di dinas tersebut sudah dianggap mencantumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 dan tidak ditemukan kendala dalam prosesnya.



Lampiran

Laporan Wawancara dengan Staf PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Oktober 2018

Pukul : 11.30 WIB

Tempat : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Narasumber : Junanto Hari

Pewawancara : Elva Visoladilla Indi Scorvir

Menurut bapak Junanto Hari, tugas PPID yaitu; Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi, Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku, Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik, Pengujian konsekuensi, Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya, Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses, Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Beliau mengatakan bahwa layanan PPID di dinas tersebut diberlakukan sejak tahun 2016. Selama ini layanan PPID di dinas tersebut sudah dilakukan dan berjalan lancar, terutama dalam melayani pemohon informasi. Perihal struktur terbaru PPID dan Surat Keputusan (SK) 2018 susah ditetapkan dan bisa diperoleh.

Menurut beliau, Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2018 disediakan dan setiap tahun ditetapkan serta dapat diperoleh. Ditemukan adanya kendala layanan PPID yakni keterbatasan tenaga dalam mengelola data PPID.

Selama ini 4 kategori informasi di dinas tersebut belum dianggap mencantumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010. Bahkan beliau menyatakan tidak mengerti dan tidak tahu menahu soal adanya PERKI No. 1 Tahun 2010 tersebut sehubungan dengan 4 kategori informasi tersebut. Selama ini, beliau dan rekan membuat data tersebut dengan cara mengambil contoh dari salah satu dinas tertentu dan kemudian mencocokkan sesuai dengan keperluan.

Dinyatakan oleh beliau bahwa memang terjadi adanya kesalahan teknis di situs yang menyebabkan hilangnya informasi yang tadinya sudah dicantumkan, yang kemudian dapat hilang dengan sendirinya karena data yang lama tenggelam dan tergantikan dengan data yang baru. Bahkan informasi terkait SOP, DIP, struktur PPID, tugas PPID dan 4 kategori informasi yang tadinya tercantum di situs (walau tidak dapat diakses), sekarang hilang, dengan kata lain informasi terkait tersebut tidak tercantum lagi di situs.

Lampiran

**Laporan Wawancara dengan Staf PPID Dinas Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa
Tengah**

Hari/Tanggal : Selasa, 25 September 2018

Pukul : 11.00 WIB

Tempat : Dinas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Narasumber : Ibu Rumasinah, seorang staff PPID BAPPEDA Pemprov
Jateng

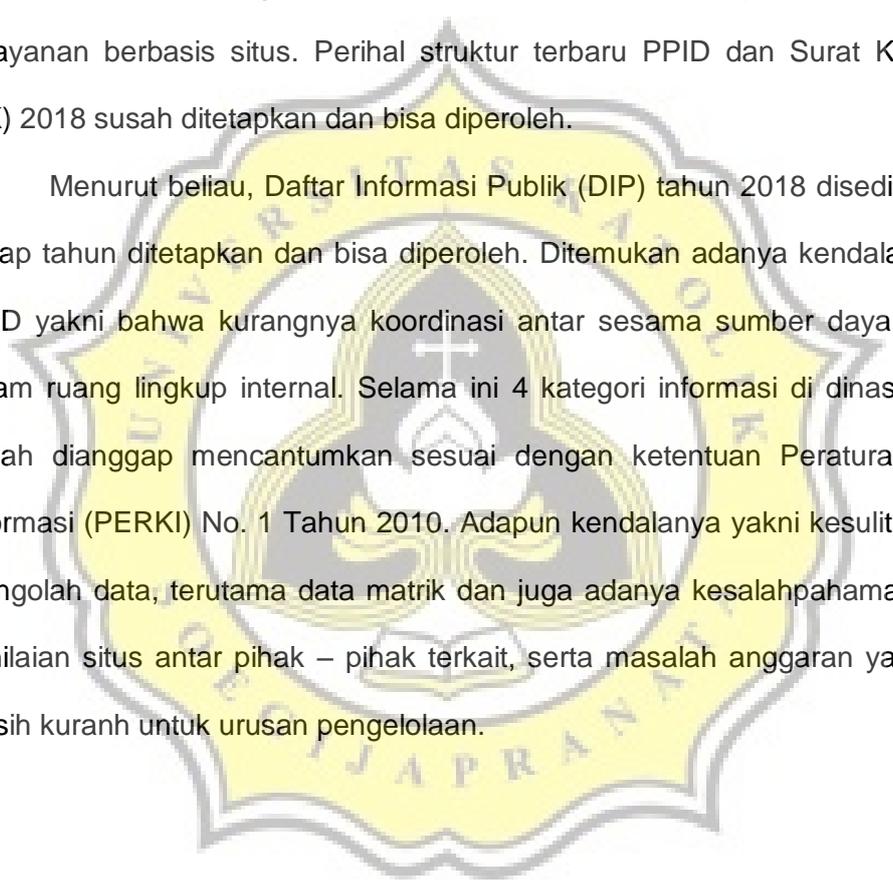
Pewawancara : Elva Visoladilla Indi Scorvir

Menurut staf PPID, tugas PPID yaitu; Mengklasifikasikan informasi berdasar 4 kategori informasi (informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta – merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan), Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya, Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik, Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya, Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya, Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat, Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama dan

Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Beliau mengatakan bahwa layanan PPID di dinas tersebut diberlakukan sejak tahun 2014. Selama ini layanan PPID di dinas tersebut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemohon informasi juga lancar dilakukan, pada umumnya cenderung pada pelayanan berbasis situs. Perihal struktur terbaru PPID dan Surat Keputusan (SK) 2018 susah ditetapkan dan bisa diperoleh.

Menurut beliau, Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2018 disediakan dan setiap tahun ditetapkan dan bisa diperoleh. Ditemukan adanya kendala layanan PPID yakni bahwa kurangnya koordinasi antar sesama sumber daya manusia dalam ruang lingkup internal. Selama ini 4 kategori informasi di dinas tersebut sudah dianggap mencantumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010. Adapun kendalanya yakni kesulitan dalam mengolah data, terutama data matrik dan juga adanya kesalahpahaman perihal penilaian situs antar pihak – pihak terkait, serta masalah anggaran yang dinilai masih kurang untuk urusan pengelolaan.



Lampiran

Laporan Wawancara dengan Sekretaris PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Hari/Tanggal : Rabu, 26 September 2018

Pukul : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Kepala Bidang Statistik

Narasumber : Bapak Tubayanu, Sekretaris PPID Utama Diskominfo
Pemprov Jateng

Pewawancara : Elva Visoladilla Indi Scorvir

Menurut bapak Tubayanu, tugas PPID yaitu; Mengklasifikasikan informasi berdasar 4 kategori informasi (informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta – merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan), Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya, Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik, Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya, Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya, Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat, Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama dan Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Beliau mengatakan bahwa layanan PPID di dinas tersebut diberlakukan sejak tahun 2010. Selama ini layanan PPID di dinas tersebut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beliau menyatakan bahwa secara umum pelayanan melalui situs sangat gencar dilakukan, namun pelayanan melalui via manual (*surat/direct message*) juga tetap dilakukan. Saat ini dinas tersebut sedang melakukan inovasi pelayanan informasi melalui penciptaan aplikasi “Jateng Slim” berbasis *Internet Mobile*. Perihal struktur terbaru PPID dan Surat Keputusan (SK) 2018 susah ditetapkan dan bisa diperoleh.

Menurut beliau, Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2018 disediakan dan setiap tahun ditetapkan. Ditemukan adanya kendala layanan PPID yakni adanya kekurangan tenaga sumber daya manusia dalam mengolah data PPID, pemahaman masyarakat yang dinilai kurang mengerti dalam tata cara dan prosedur dan kendala pendanaan yang dinilai selama ini masih kurang dalam tata pengelolaannya. Selama ini 4 kategori informasi di dinas tersebut sudah dianggap mencantumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010. Adapun ditemukan kendala dalam prosesnya yakni seringkali kurang patuhnya pihak – pihak terkait dalam pengelolaan data untuk segera memberikan data/memproses data.

Dinyatakan oleh beliau bahwa belum tercantumnya Tugas PPID di situs karena masih dalam proses (*situs/website* masih baru).

Lampiran

**Laporan Wawancara dengan staf PPID Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah**

Hari/Tanggal : 17, 26 , 28 September; 7-8 November 2018

Narasumber : staff PPID BKD Pemprov Jateng

Menurut staf PPID tugas PPID (menurut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1 Tahun 2013) yaitu; Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi, Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku, Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik, Pengujian konsekuensi, Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya, Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses, Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Selama ini layanan PPID di dinas tersebut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perihal struktur terbaru PPID dan Surat Keputusan (SK) 2018 susah ditetapkan dan bisa diperoleh.

Menurut beliau, Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2018 disediakan dan setiap tahun ditetapkan. Sejauh ini dinilai tidak ditemukan adanya kendala layanan PPID, karena selama ini permohonan informasi selalu dapat dipenuhi. Selama ini 4 kategori informasi di dinas tersebut sudah dianggap mencantumkan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 dan tidak ditemukan kendala dalam prosesnya.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22/09.II/2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Meningatkan :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/06.II/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor :14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
13. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/06.11/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan

KESATU

Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA

Untuk Penetapan Klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat khusus sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.

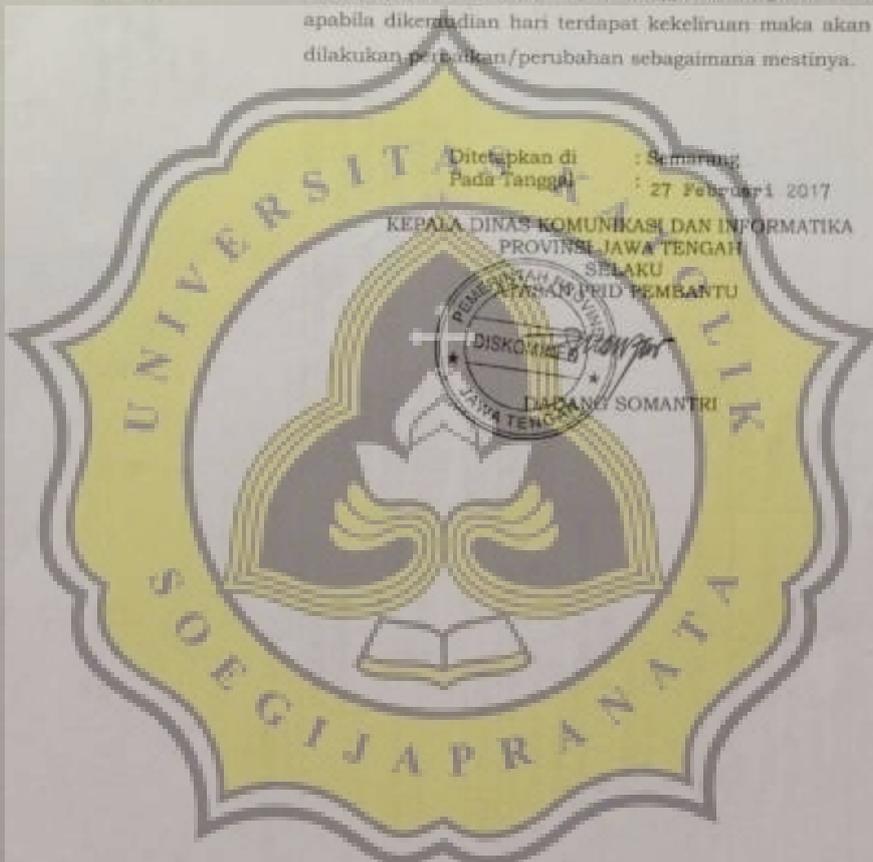
KEEMPAT : Klasifikasi Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah tersedia dan diumumkan pada www.ppid.diskominfo.jatengprov.go.id sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

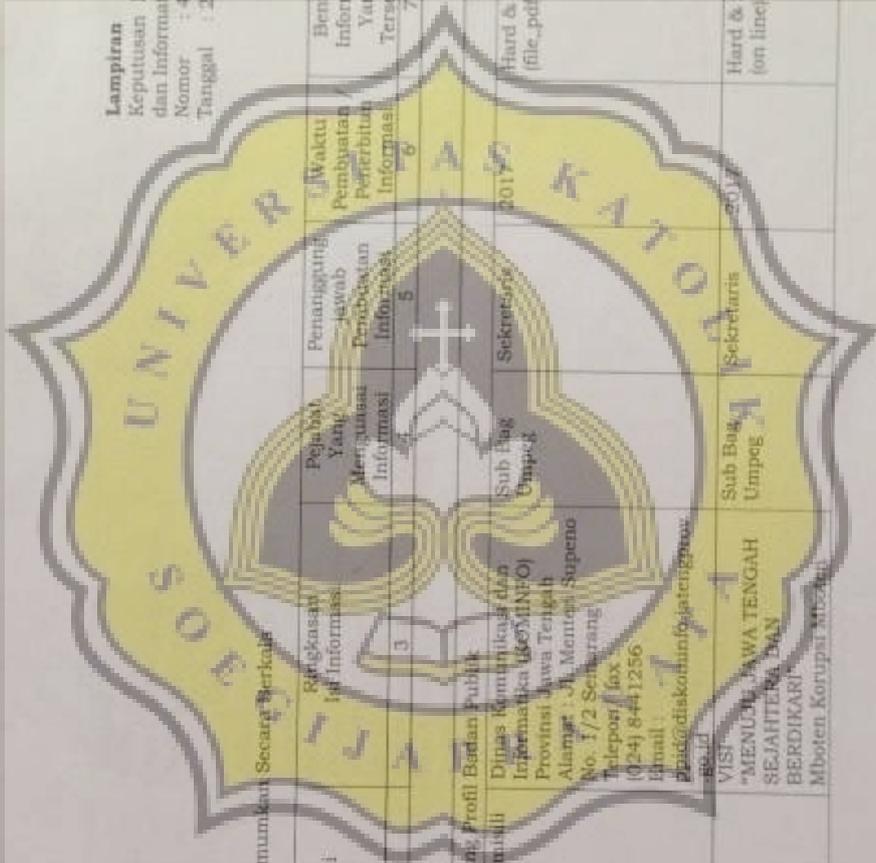
Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 27 Februari 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
PEMBANTU PPID PEMBANTU

DIDANG SOMANTRI

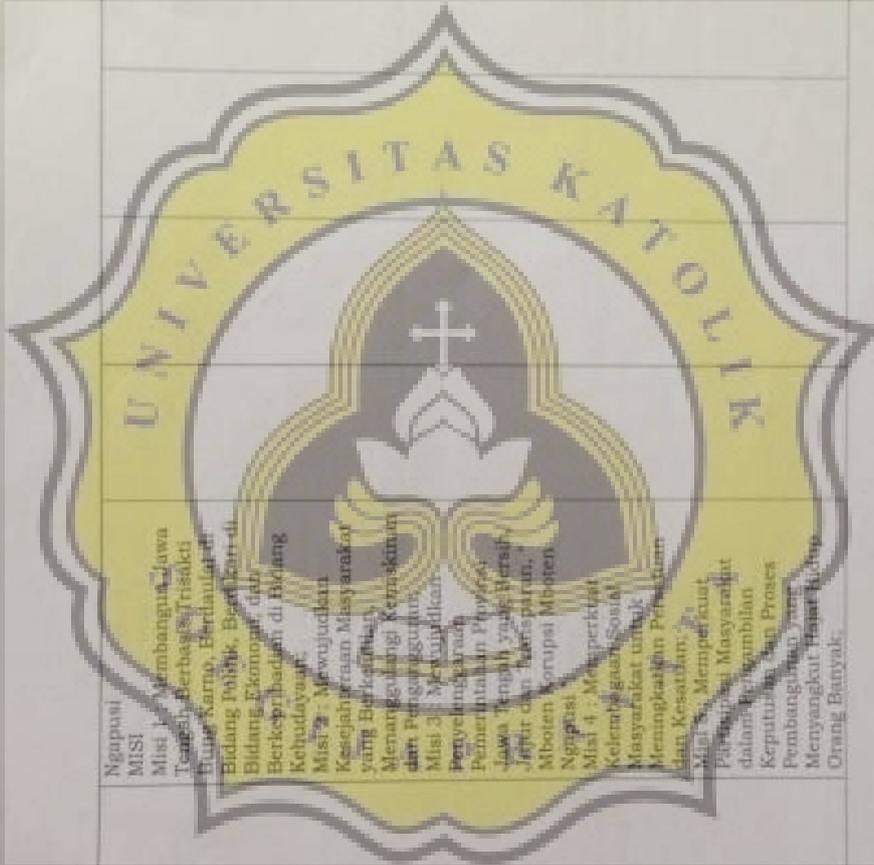


Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 487.22/09.II/2017
Tanggal : 27 Februari 2017



1. Informasi Yang Diumumkan Secara Berkala

No	Judul Informasi	Rafekasari 1st Informasi	Pejabat Yang Merespon Informasi	Penanggung Jawab Tanggung Informasi	Waktu Pembuatan Perbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimp anan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SEKRETARIAT							
1.1	Informasi tentang Profil Badan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jl. Menteng Supeno No. 1/2 Semarang Telepon / fax (024) 8441256 Email : pda@diskominfojatengprov -88.id		Sub Bag Umpan	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	Selama berlaku	website
1.2	Visi & Misi		Sub Bag Umpan	Sekretaris	2017	Hard & Soft (on line)	Selama berlaku	website



Ngapawai

MISI

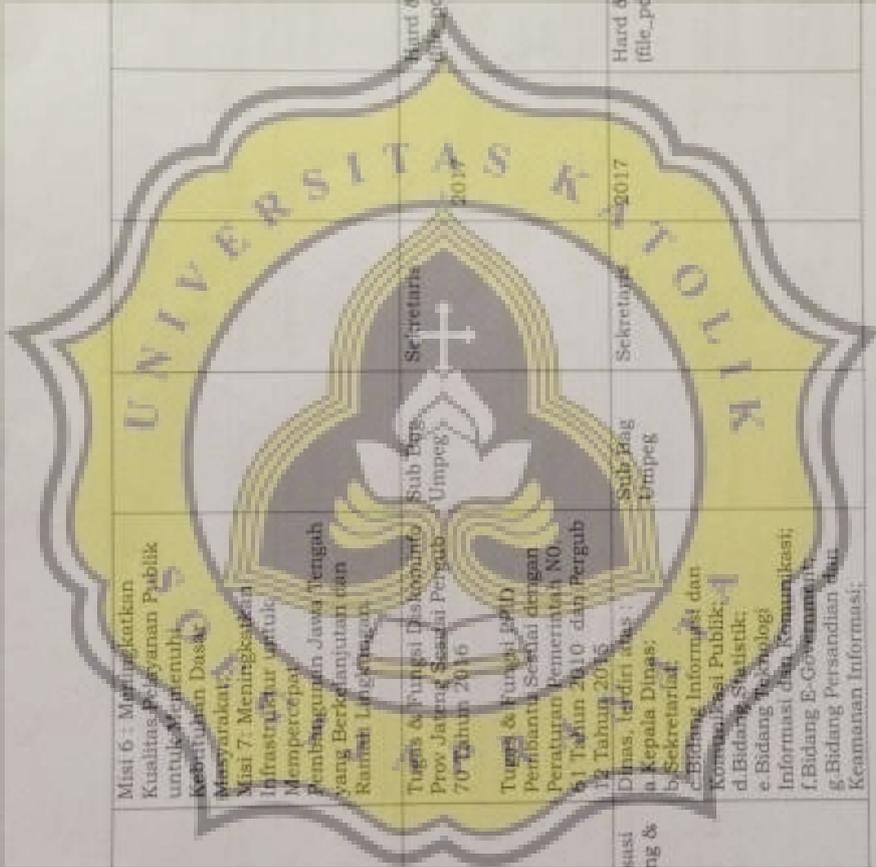
Misi 1: Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti: **Utang Karno, Bertauladan Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.**

Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Menggalangi Kersukmahan dan Partisipasi Masyarakat.

Misi 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan **Progres Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Terpercaya.**

Misi 4: Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persebaran **Kepercayaan**.

Misi 5: Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Proses **Pembangunan yang Menyangkut Himpun Banyak Orang Banyak.**



	<p>Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;</p> <p>Misi 7: Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan;</p> <p>Tugas & Fungsi Direktorat Sub Bag Umpeg 70 Tahun 2016</p> <p>Tugas & Fungsi BID Peribantia Sejalan dengan Peraturan Pemerintah NO. 61 Tahun 2010 dan Pergub 12 Tahun 2015</p> <p>Dinas, terdiri atas :</p> <p>a. Kepala Dinas;</p> <p>b. Sekretaris;</p> <p>c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;</p> <p>d. Bidang Statistik;</p> <p>e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;</p> <p>f. Bidang E-Government;</p> <p>g. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;</p>	<p>Sekretaris Sub Bag Umpeg</p>	<p>Hard & Soft (file.pdf)</p>	<p>Selama berlaku</p>	<p>website</p>
<p>1.3 Tugas & Fungsi</p>		<p>Sekretaris Sub Bag Umpeg</p>	<p>Hard & Soft (file.pdf)</p>	<p>Selama berlaku</p>	<p>website</p>
<p>1.4 Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang & Fungsi</p>		<p>Sekretaris Sub Bag Umpeg</p>	<p>Hard & Soft (file.pdf)</p>	<p>Selama berlaku</p>	<p>website</p>

1.5	Informasi Pelayanan			Sub Bag Umpeg	2017				
1.6	SDM yang dimiliki	h. UPT Diars, UPT RPID dan UPT LPSE dan i. Kelengkapan Jabatan Fungsional	Mekanisme Pemohonan Informasi Komposisi Pegawai Diskominfo Prov Jateng dengan jumlah pegawai PNS sebanyak 137 orang dan Nong PNS 51 orang	Sub Bag Umpeg	2017	Hard & Soft (file .pdf)	Selama berlaku	website	
1.7	Profil Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika		Kepala Dinas : Dandang Sohantri NIP : 196310221987031007 Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda (IV/g)	Sub Bag Umpeg	2017	Hard & Soft (file .pdf)	Selama berlaku	website	
1.8	LHKPN		LHKPN Kepala Dinas Kominfo Prov Jateng Tahun verifikasi 2016	Sub Bag Umpeg	2016	Hard / Soft (pdf)	Selama masih berlaku	website	
2.	Ringkasan Program & kegiatan		Kegiatan yang sedang dijalankan						
2.1	Nama program & kegiatan		Program dan Kegiatan Diskominfo Prov Jateng tahun 2017	Sub Bag Program	2017	Hard & Soft (file .pdf)	5 tahun	website	
2.2	Penanggung jawab & Pelaksana Program		Penanggung Jawab dan Pelaksana Program Kegiatan Diskominfo Prov Jateng 2017	Sub Bag Program	2017	Hard & Soft (file .pdf)	5 tahun	website	
2.3	Target & Capaian Program / Kegiatan		Target dan Capaian kegiatan Diskominfo Prov Jateng 2017	Sub Bag Program	2017	Hard & Soft (file .pdf)	5 tahun	website	



2.4	Jadwal Pelaksanaan Program/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017	Sub Bag Program	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file_pdf)	5 tahun	website
2.5	Nilai Anggaran Kegiatan per Program	Nilai Anggaran Kegiatan Sesuai RAK disamping tahun 2017	Sub Bag Program	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file_pdf)	5 tahun	website
2.6	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	Twitter : https://twitter.com/kominfo316 Instagram : https://www.instagram.com/kominfo316 Facebook : https://www.facebook.com/diakominfo316 Kanal Pengaduan : http://laporbbj.stn.gov.go.id/	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file_pdf)	5 tahun	Twitter Instagram Facebook Kanal Pengaduan
2.7	Informasi tentang Rekrutmen Pegawai	Belum ada				Hard & Soft (on line)	Selama masih berlaku	
2.8	Informasi tentang pelaksanaan pendidikan & penelitian	Informasi tentang Pelatihan E-Penatausahaan, Informasi tentang Pelaksanaan Perbaikan Administrasi-Perkantoran SHMAYA, Informasi TOT Gaps dan Complaint Handling	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file_pdf)	5 tahun	Cetak dan elektronik
2.9	Informasi tentang pelaksanaan pelatihan khusus	Informasi tentang Pelatihan E-Penatausahaan, Informasi tentang Pelaksanaan Bimtek	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file_pdf)	5 tahun	Cetak dan elektronik

	Administrasi Perkantoran SIMAYA, Informatika FOT GRMS dan Complaint Handling	UNIVERSITAS KALIDENEJARA				
3.	Ringkasan Kinerja yang telah dilaksanakan	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	1 tahun	website
3.1	Penilaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun sebelumnya	Sub Bag Program	2017	Hard & Soft (file .pdf)	1 tahun	website
3.3	Laporan seluruh Program & Kegiatan yang telah dijalankan	Sub Bag Program	2017	Hard & Soft (file .pdf)	1 tahun	website
3.4	Laporan Umum & Keuangan tahunan Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sub Bag Keruangan	2017	Hard & Soft (file .pdf)	1 tahun	website
3.5	Informasi lain yang mengambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan	Sub Bag Program	2017	Hard & Soft (file .pdf)	1 tahun	website
3.6	Data Statistik kegiatan	Sub Bag Program	2017	Hard & Soft (file .pdf)	1 tahun	website
3.7	Target dan Penyerapan Kegiatan	Sub Bag Program	2017	Har & Soft (file .pdf)	1 tahun	website

5.2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi Publik	waktu yang diperlukan sesuai dengan UU 14 Tahun 2008 dan Perda 1 Tahun 2010	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	5 tahun	website
5.3	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak	Jumlah permohonan yang dikabulkan hingga bulan April 2017 sebanyak 16 dari 18 permohonan informasi publik	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	5 tahun	website
5.4	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Ada 2 permohonan dengan alasan tidak memenuhi dan bukan kewenangan	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	5 tahun	website
6.	Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa							
6.1	Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa	REP Diskominfo ada di website ipse.jatengprov.go.id (dikarenakan LPSE sesuai Pergub 70 tahun 2016 menjadi bagian UPT Diskominfo Prov. Jateng)	UPT LPSE	Kepala Dinas	2017	Hard & Soft (file .pdf)	selama masih berlaku	website
6.2	Pengumuman Proses Pengadaan	Pengumuman proses pengadaan pada Diskominfo ada di website ipse.jatengprov.go.id (dikarenakan LPSE sesuai Pergub 70 tahun 2016 menjadi bagian UPT Diskominfo Prov. Jateng)	UPT LPSE	Kepala Dinas	Setiap Proses Pengadaan	Hard & Soft (online)	selama masih berlaku	website

7.	Informasi tentang Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file, pdf)	selama masih berlaku	website	
7.1	Daftar rancangan proses peraturan	Berisi tentang Rancangan Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Kepala Dinas	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file, pdf)	selama masih berlaku	website
7.2	Daftar Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan	Berisi tentang Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Kepala Dinas	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file, pdf)	selama masih berlaku	website
8.	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi	1. Mekanisme Permohonan Informasi Publik 2. Mekanisme Keberatan Informasi Publik 3. Form pengisian permintaan informasi publik	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file, pdf)	selama masih berlaku	website

9.	Informasi tentang hak dan tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat	Tata cara pengaduan ASN dan form pengaduan pelanggaran ASN	Sub-Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	5 Tahun	website
10.	Daftar Standar & Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan	SOP SMS LAPOR GUB SOP LPSE SOP laporgub.jatengprov.go.id SOP Pelayanan Informasi Publik	Sub-Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	selama masih berlaku	website
11.	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat	Masih dalam proses pendokumentasian	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	selama masih berlaku	Cetak dan Elektronik
II	BIDANG STATISTIK							
1	Rekap aduan langsung dan hotline center	Rekap aduan masyarakat secara langsung atau melalui hotline center	Seksi Yandip	Kabid Statistik	2017	Hardcopy dan Soft Copy	selama masih berlaku	Website
2	Rekap berita daerah (newsroom) jatengprov.go.id dari Kabupaten/Kota se Jawa Tengah	Rekap berita daerah (newsroom) yang telah diupload di website jatengprov.go.id dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah	Seksi Yandip	Kabid Statistik	2017	Hardcopy dan Soft Copy	selama masih berlaku	Website

3	Rekap pemohon informasi Pembantu	Rekap pemohon informasi PPIID Pembantu baik secara langsung atau online	Seksi Yandip	Kabid Statistik	2017	Hardcopy dan Soft Copy	Selama berlaku	Website
4	Data informasi nasional lintas sektoral	Berita/informasi skala nasional dari berbagai sektor	Seksi Statistik	Kabid Statistik	2017	Hardcopy dan Soft Copy	Selama berlaku	Website
5	Data informasi regional lintas sektoral	Berita/informasi skala regional dari berbagai sektor	Seksi Statistik	Kabid Statistik	2017	Hardcopy dan Soft Copy	Selama berlaku	Website
6	Buku Jawa Tengah Dalam Angka	Memuat data provinsi Jawa Tengah 5 tahun terakhir tentang : a. Geografi b. Pemerintahan c. Kependudukan & Sektor d. Sosial e. Pertanian f. Industri, Pertambangan, Energi & Konstruksi g. Perdagangan h. Hotel dan Pariwisata i. Transportasi dan Komunikasi j. Pengeluaran Produk Konsumsi Makanan & Minuman k. Pendapatan Regional l. Perbandingan antar Provinsi	Seksi Statistik	Kabid Statistik	Update data tahun 2015 terbit setiap tahun pada bulan Agustus	Hardcopy	Selama berlaku	Website

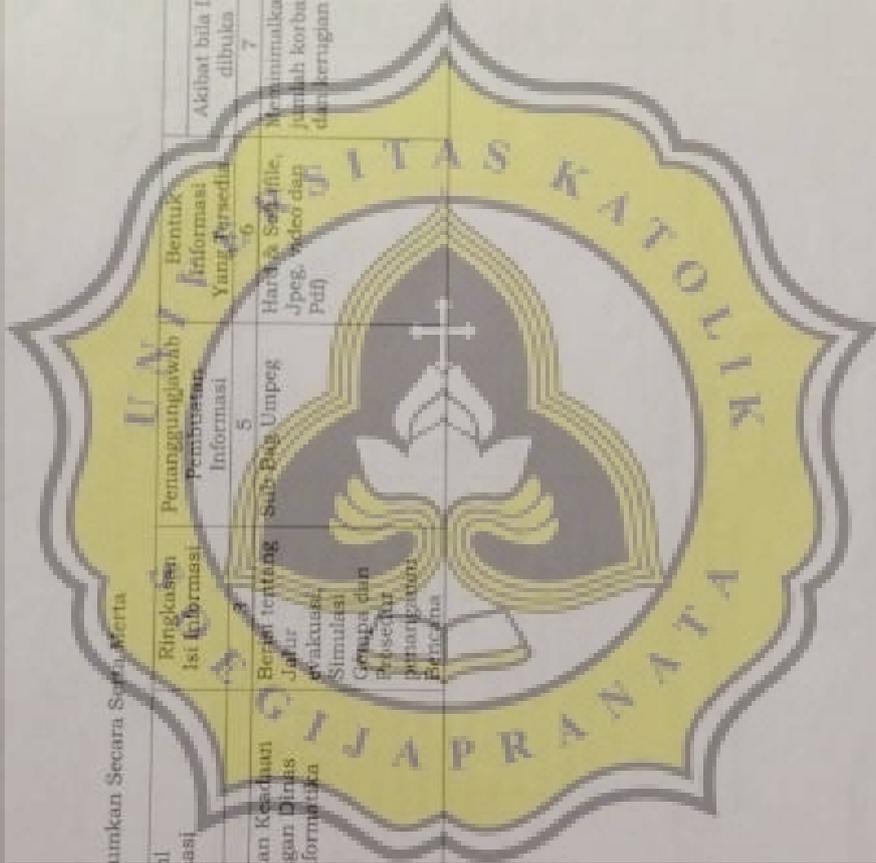
7	Buku PDRB Provinsi Jawa Tengah	Memuat data analisis PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut sektor	Seksi Statistik	Kabid Statistik	Update data tahun 2016, terbit setiap tahun pada bulan Agustus	Hardcopy	Selama berlaku	Website
8	Buku Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se Jawa Tengah	Memuat data dan perbandingan PDRB antar Kabupaten/Kota dilihat dari 3 sektor utama yang dominan	Seksi Statistik	Kabid Statistik	Update data tahun 2016, terbit setiap tahun pada bulan November	Hardcopy	Selama berlaku	Website
9	Tabel Output Input Jawa Tengah Tahun 2013	Memuat tabel I-0 Jawa Tengah dan meliputi : a. Struktur output & nilai tambah bruto b. Struktur input antara & lokasi permintaan regional c. Neraca perdagangan d. Daya pabyebaran & derajat kepekaan e. Pengaruh permintaan akhir output & nilai tambah	Seksi Statistik	Kabid Statistik	Update data tahun 2013, terbit setiap tahun sekali	Hardcopy	Selama berlaku	Website
III	BIDANG E-GOVERNMENT							
1	SMS Center & SMS Laport Gub	Pengaduan masyarakat Jawa Tengah melalui MS nomor 18112920200	Seksi Pengembangan Aplikasi	Kabid Government	Setiap saat	Hardcopy Kelap SMS Center	Selama berlaku	Website

6	Tata cara memperoleh Informasi Publik Sekretariat KPID	Informasi tentang bagaimana memperoleh Informasi Publik Sekretariat KPID	Subbag Kerjasama dan Pengembangan Sekretariat KPID	Ka DPT KPID 2015	Online	Selama berlaku	Elektronik
7	Tata cara pengaduan Sekretariat KPID	Informasi tentang tata cara pengaduan	Subbag TU Sekretariat KPID	Ka UPT KPID 2015	Online	Selama berlaku	Elektronik
8	Informasi pengaduan barang/jasa Sekretariat KPID	Informasi tentang pengumuman barang/jasa Sekretariat KPID	Subbag TU Sekretariat KPID	Ka UPT KPID 2015	Online	2015	Elektronik
9	Prosedur peringatan dini Sekretariat KPID	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur es abang keaduan darurat Sekretariat KPID	Subbag TU Sekretariat KPID	Ka UPT KPID 2015	Offline	Selama berlaku	Elektronik
VI	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK						
1	Rekap aduan masyarakat melalui media sosial	Rekap aduan masyarakat melalui akun media sosial resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (@twitter, Instagram, dan Facebook)	Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Update data tahun 2017	Hardcopy dan Soft Copy	Website
2	Rekap aduan masyarakat melalui kanal Laporgub	Rekap aduan masyarakat melalui kanal Laporgub sebagai admin Dinas Komunikasi dan Informatika	Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	2017	Hardcopy dan Soft Copy	Website

3	Rekap aduan masyarakat melalui email dan website Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng	Rekap aduan masyarakat melalui komunikasi email dan website Dinas Komunikasi dan Informatika	Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	2017	Hardcopy dan Soft Copy	Selama berlaku	Website	
4	Rekap berita utama jatengprov.go.id	Rekap berita utama yang telah diunggah pada website jatengprov.go.id	Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	2017	Hardcopy dan Soft Copy	Selama berlaku	Website	
5	Rekap berita OPD jatengprov.go.id	Rekap berita OPD-Etwinas Jawa-Tengah yang telah diunggah pada website jatengprov.go.id	Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	2017	Hardcopy dan Soft Copy	Selama berlaku	Website	
6	Perjanjian Kerjasama	Surat Perjanjian (kontrak) pengadaan barang/jasa	Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	2017	Hardcopy dan Soft Copy	Selama berlaku	Website	
VII	LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK								
1	Rekap SIRUP	Rekap data paket-paket pengadaan barang/jasa pada OPD Provinsi Jawa Tengah	LKPP/Ka LPSE	Kepala Dinas	2017	Hardcopy dan Soft Copy	Selama berlaku	Website	
2	Rekap Layanan E-Procurement	Rekapitulasi jelang di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	LKPP/Ka LPSE	Kepala Dinas	2016	Hardcopy dan Soft Copy	Selama berlaku	Website	

2. Informasi Yang Diumumkan Secara Serta Merta

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pemangungjawab Pemberitaan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Akibat bila info dibuka	Konsekuensi Akibat bila info ditutup
1.	Prosedur Penanganan Keaduan Bencana di lingkungan Dirnis Komunikasi Dan Informatika	Berita tentang Jafur Wakusasi Stimulasi Gruppa dan pesesepan pempangan Performa	Sub-Bag Umpeg	Harda Soft file, Jpeg, video dan pdf	7	8



3. Informasi Yang Tersedia Setiap Saat

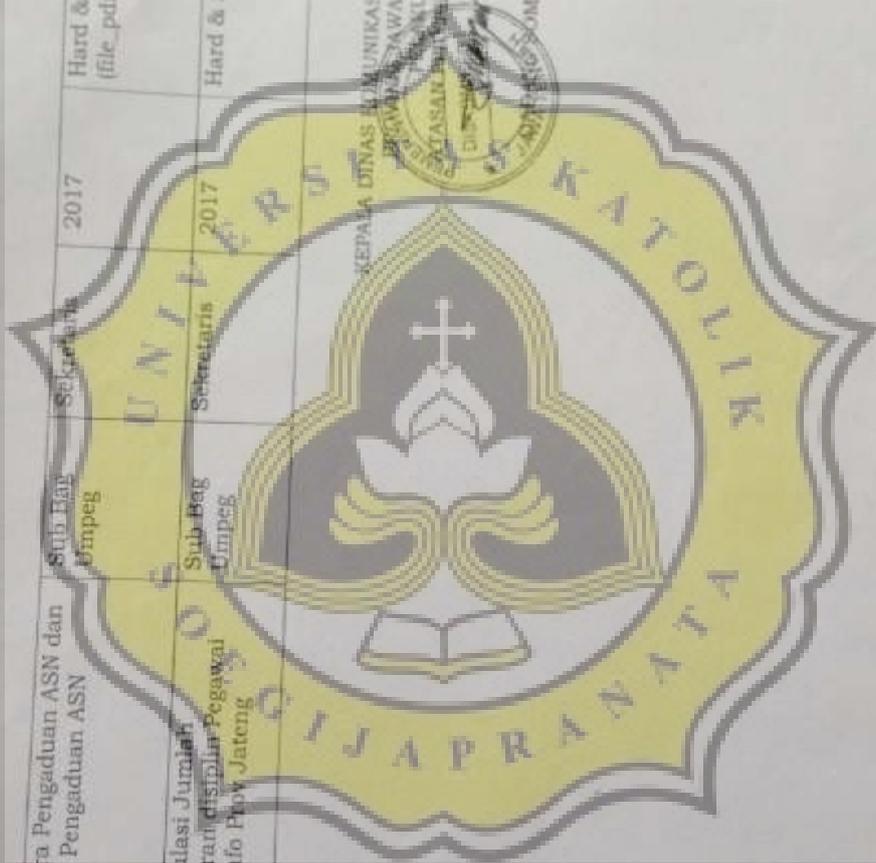
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Perubahan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1.	Daftar Informasi Publik	Berisi tentang informasi-informasi publik yang tersedia secara berkala, serta memuat setiap saat & dikemas dalam Kelembagaan, Surat Keputusan dan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan serta Kebijakan Perundang-undangan Dan Peraturan Yang Digunakan Di Dinas Komunitas Dan Informetika	Sekretaris	Kepala Dinas	2017	Hard & Soft (file_pdf)	selama berlaku	website
2.	Informasi tentang Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan	Dokumen/naskah pendukung informasi-informasi wajib berkala yang meliputi HKRN, Laporan Keuangan, Program dan Kegiatan, Profil Badan Publik	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file_pdf)	selama berlaku	website
3.	Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan		Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file_pdf)	selama berlaku	website
4.	Informasi tentang organisasi, administrasi dan keuangan		Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file_pdf)	5 tahun	website
4.1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan		Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file_pdf)	5 tahun	website

4.2	Profil lengkap pimpinan & pejabat struktural yang meliputi data pribadi, jabatan, pendidikan terakhir, dan masa kerja, serta diklat yang diikuti	Profil Singkat Pejabat Struktural Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Soft (aplikasi SIMPEG) & Online	selama berlaku	website
4.3	Anggaran secara umum/ khusus serta laporan keuangannya	Masih dalam proses pendokumentasian	Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	selama berlaku	Cetak & Elektronik
4.4	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan dan Kegiatan yang dilakukan Diskominfo pada Bulan Januari-Februari 2017	Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	selama berlaku	website
4.5	DPA	DPA Diskominfo Tahun 2017	Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	selama berlaku	website
4.6	RKA	RKA Diskominfo Tahun 2017	Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	selama berlaku	website
4.7	LRA DPA	Laporan Realisasi Anggaran Diskominfo Tahun 2017	Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	selama berlaku	website
5.	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok & fungsinya	Diskominfo-Prov Jateng update tiap Bulan	Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2017	Hard & Soft (file .pdf)	selama berlaku	website

6.	Daftar perjanjian dengan pihak ketiga		2017	Cetak & Elektronik
6.1	Kontrak Pengadaan Barang & Jasa	Tersedia Kontrak pengadaan barang dan jasa pada Dinkominfo Prov. Jateng	Sekretaris	selama masih berlaku
6.2	Perjanjian Kerja Sama Tahun 2016	Tersedia Perjanjian kerjasama barang dan jasa pada Dinkominfo Prov. Jateng	Sekretaris	selama masih berlaku
6.3	Perjanjian Kerja Sama lainnya	Kerja Sama dengan Instansi lain	Sekretaris	selama masih berlaku
7.	Daftar Aset & Investasi	Asesmen Investasi Disdiknpti 2017	Sekretaris	Hard (KIB) & Soft
8.	Rencana Strategis	Rencana Strategis Diskominfo masih mengikuti Rencana Dirubkominfo Prov. Jateng 2013-2018	Sekretaris	Hard & Soft
9.	Agenda kerja pimpinan Badan Publik	Agenda Kerja Pimpinan Diskominfo Prov. Jateng update tiap Bulan	Sekretaris	Hard & Soft
10.	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik	Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Data Digi Informasi Publik	Sekretaris	Hard & Soft
11.	Gambaran umum pelangan yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	Tata Cara Pengaduan ASN dan Formalitas Pengaduan ASN	Sekretaris	Hard & Soft

12.	Gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya Daftar penelitian	Rekapitulasi bulanan kanal pengaduan sms center, sms laporgub, website laporgub.jatengprov.go.id Hotline Center, dan aduan langsung Masih dalam proses pendokumentasian	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Ka UPT Diskominfo Sub-Bag Umpeg	Kepala Dinas 2017	Hard & Soft (file_pdf)	selama berlaku	website
13.					Hard & Soft (file_pdf)	selama masih berlaku	Cetak dan Elektronik
14.	Daftar Informasi tentang kebijakan & peraturan	SK Kepala Dinas Kominfo Prov Jateng yang terbit tahun 2017	Sub-Bag Umpeg	Sekretaris 2017	Hard & Soft (file_pdf)	selama masih berlaku	website
15.	Daftar Standar & Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan	1. SOP SWS LAPOR GUB 2. SOP EPSE 3. SOP laporgub.jatengprov.go.id 4. SOP Pelayanan Informasi Publik 5. SOP Pengaduan Masyarakat Adadan Langsung 6. SOP Pengaduan Hotline 7. SOP Upload berita pada website.jatengprov.go.id 8. SOP Upload berita pada website diskominfo.jatengprov.go.id	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Ka UPT Diskominfo	Kepala-Dinas 2017	Hard & Soft (file_pdf)	selama masih berlaku	website
16.	Informasi tentang hak & tata cara memperoleh Informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi	1. Mekanisme Pemohonan Informasi Publik 2. Mekanisme Keberatan Informasi Publik 3. Form pengisian permintaan informasi publik	Sub Bag Umpeg	Sekretaris 2017	Hard & Soft (file_pdf)	selama berlaku	website

17.	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang	Tata Cara Pengaduan ASN dan Formulir Pengaduan ASN	Sub Bag Umpeg Sekretaria	2017	Hard & Soft (file .pdf)	selama berlaku	website
18.	Informasi tentang rekapitulasi pelanggaran disiplin pegawai	Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran disiplin Pegawai Diskominfo Prov. Jateng	Sub Bag Umpeg Sekretaris	2017	Hard & Soft	selama berlaku	Cetak dan Elektronik



KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Informasi tentang Profil Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya dan Pimpinan OPD							
a.	Visi dan Misi	KA. Sub. Bag Program	Kepala Dinas	Pembuatan 2013 dan Perubahan 2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
b.	Tugas Pokok dan Fungsi	KA. Sub. Bag Program	Kepala Dinas	Pembuatan 2013 dan Perubahan 2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
c.	Struktur Organisasi dan Profil OPD	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
d.	Sumber Daya Manusia	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
e.	Informasi tentang Kekuasaan atau Domini OPD beserta alamat lengkap	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
f.	URKPN Pejabat yang sudah diverifikasi	Sekretaris Selaku PPID	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy	Selama berlaku	Website
2. Informasi tentang Kegiatan dan Kinerja Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya							
Informasi Program Dan Kegiatan Yang Sedang Berjalan							
a.	Nama Program dan Kegiatan	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	Pemangku jawab dan Pelaksana Program	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	Target dan Capaian Program dan Kegiatan	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	Anggaran Program dan Kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
b.	Kerangka Acuan Kerja (KAKTOR) TA. 2017	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	2016	Soft copy	1 tahun	Website
c. Agenda penting OPD							
	- Rencana Rakor, di pada SKPD pada th. Berjalan	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Selaku PPID	Setiap kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	- Agenda penting lainnya	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Selaku PPID	Setiap kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya							
a.	Ringkasan informasi kinerja berisi progres target dan realisasi pelaksanaan kegiatan sebulan-bulan tahun 2017	KA, Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
b.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	KA, Sub. Bag Program	Kepala Dinas	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
4. Ringkasan Laporan Keuangan							
a.	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	KA, Sub. Bag Keuangan	Kepala Dinas	2016	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
b.	Neraca	KA, Sub. Bag Keuangan	Kepala Dinas	2016	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
c.	Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku	KA, Sub. Bag Keuangan	Kepala Dinas	2016	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
d.	Daftar Aset dan Investasi	KA, Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Selaku PPID	2016	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik							
a.	Jumlah Permohonan Informasi Publik	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
b.	Waktu yang diperlukan dalam memproses setiap permohonan Informasi Publik	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
c.	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dibatalkan maupun yang ditolak	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
d.	Akuan Penolakan Permohonan Informasi Publik	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
6. Informasi Mengenal Hak Mempertahankan Informasi di OPD							
a.	Tata cara memperoleh informasi publik	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
b.	Tata cara mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
c.	Tata cara atas tidak ditanggapi/tidak puas jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
d.	Form permohonan dan keberatan	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
7. Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran di OPD							
a.	Alur/Skema Pengaduan (Tata Cara)	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
b.	Form/Lembar Isian Pengaduan	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1.	2	3	4	5	6	7	8
c.	Kontak Pengaduan ke Pejabat yang berwenang menerima pengaduan dan penyalahgunaan wewenang	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
d.	Hasil penanganan pengaduan	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
5.	Informasi Peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Sekretaris Selaku PPID	Kepala Dinas	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
9.	Pengumuman Barang dan Jasa						
	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	KA Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website

B. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Daftar Informasi Publik (2017)	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
2.	Rencana Strategis (2013 s/d 2018)	KA Sub. Bag Program	Kepala Dinas	Perubahan 2013 dan Perubahan 2017	Soft copy dan Hard copy	5 tahun	Website
3.	SOP Layanan Informasi	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
4.	SOP Laboratorium Pengujian	KA Seksi Pengujian	KA Balai BPP	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
5.	SOP Sewa Alat Berat	KA Seksi Perawatan	KA Balai BPP	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
6.	Peta Jaringan Jalan Provinsi Prov. Jateng	KA Seksi Perencanaan	Kabid Ranbangwas	2016	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
7.	Informasi Jalan dan Jembatan	KA Seksi Perencanaan	Kabid Ranbangwas	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
8.	Daftar Sewa Alat Berat	KA Seksi Perawatan	KA Balai BPP	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website

C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Informasi kerusakan jalan dan jembatan akibat longsor dan banjir	KA, Sub Bag Program	Kabid Rerbangwas	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website

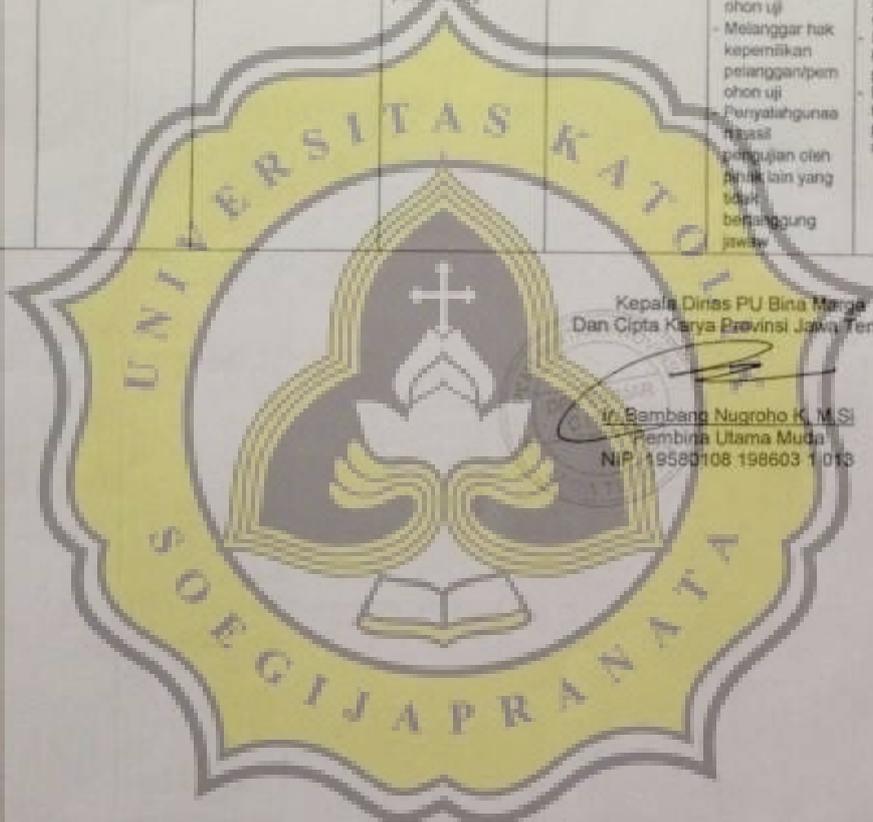
I. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biodata PNS (database)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Dokumen Berkas/rapor PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan peraturan/ketertarikan disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	Daftar nilai DP 3 PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - PP No. 16 Tahun 1974 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Data rekam medis PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permendes RI no. 269/MENKES/PER/ II/2008 tentang	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi PNS Dapat merugikan PNS Melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Untuk melindungi Keamanan dan

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
		Rekam Medis (pasal 10)				Keamanan PNS
7.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - PP no. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dim Jabatan Struktural Jo PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.	Sebagai dasar penempatan kebijakan dalam pembinaan PNS	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.
8.	Asap danau yang menurut sifatnya rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Th. 2009 tentang Keliragan	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan perilaku	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi konsistensi dokumen
9.	HPS (Kelas Perkuliahan Sederhana)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Kepres No. 80 Tahun 2003 beserta penubahannya	Orbit merupakan persaingan usaha yang sehat	Selama proses pengadaan barang/ jasa	Menghambat pelaksanaan pekerjaan yang ada, pengungkapan secara prematur (Integritas apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang lebih murah
10.	Dokumen Penawaran Kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Kepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas pemilihan
11.	Rencana Pembelian Tanah dan Properti	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4	Mengurangi ketahanan ekonomi nasional	Sampai selesainya proses pembebasan tanah	Menghambat kesuksesannya karena tidak adanya pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah
12.	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37)	Melindungi kerahasiaan Database	Tak Terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data
13.	Internet Protocol/ IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan	Melindungi hak akses	Tak Terbatas	Penerobosan/pe nyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGEJUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
		Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)				
14.	Bandwith Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Melindungi kestabilan bandwidth	Tak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diatur ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
15.	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Melindungi kerahasiaan Database	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
16.	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf J, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Melindungi Kerahasiaan Database	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
17.	Sistem Manajemen Database	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf J, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Melindungi kerahasiaan Database	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Review Laporan Keuangan 	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Per No. 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2005 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007	LHP jika dimiliki oleh orang/pihak yang tidak terkait dengan instansi terkait penyelenggaraan LHP	Tak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
		tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a.				
18.	Hasil Laboratorium Pengujian	- SNI ISO/IEC-17025: 2008 Bagian 4.1.5.	Meindungi informasi dan hak pelanggan/pemohon uji	Tak Tertbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap informasi pribadi pelanggan/pemohon uji - Melanggar hak kepemilikan pelanggan/pemohon uji - Penyalahgunaan hasil pengujian oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Meindungi informasi pribadi pelanggan/pemohon - Meindungi hak kepemilikan pelanggan - Meindungi hasil uji dari penyalahgunaan



Kepala Dinas PU Bina Marga
Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

(Signature)
W. Bambang Nugroho K. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580108 198603 1 013



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22 /13116 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,

Menimbang

- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Maka Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/14991 Tahun 2016 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Prioritas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 350/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan klasifikasi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum.
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT : Informasi yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum, serta bersifat statat dan terbahas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH DWIATMOKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR :
PERHAL : MENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

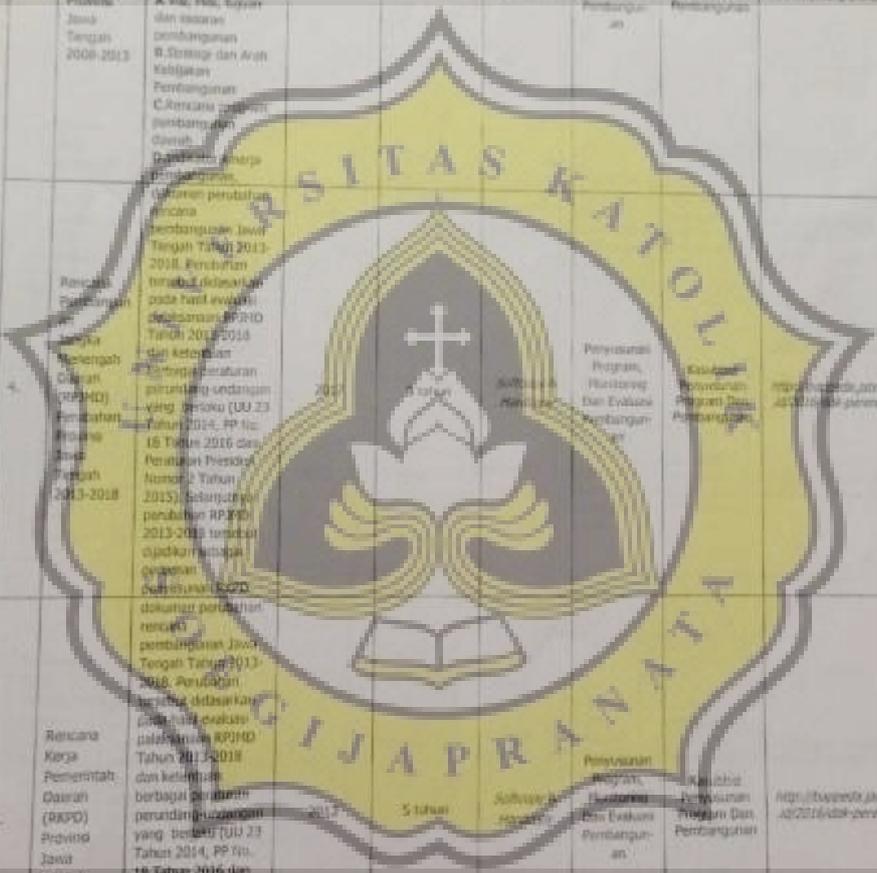
No	Judul	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi	Pejabat yang Menyusun Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	Informasi tentang Profil BAPPEDA						
a.	Struktur Organisasi dan Profil BAPPEDA	Struktur Organisasi BAPPEDA : Kepala Dinas Sekretaris Kabid & Kabidat	2017	Softcopy & Hardcopy	Sekretaris	Kesubbag Urusan Umum & Kepegawaian	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/struktur-organisasi/
b.	Survei Data Statistik yg Baru	Kemampuan Rencana BAPPEDA di awal tahun 2017	2017	Softcopy & Hardcopy	Sekretaris	Kesubbag Urusan Umum & Kepegawaian	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/indikator-pendukung-pembangunan/
c.	Tugas, wewenang dan fungsi	Tugas dan Fungsi di masing-masing bidan dan seksi	2017	Softcopy & Hardcopy	Sekretaris	Kesubbag Urusan dan Kepegawaian	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/indikator-pendukung-pembangunan/
2	Ringkasan Program dan Kegiatan Bappeda						
a.	Nama Program dan Kegiatan	Ringkasan Program prioritas untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah	2017	Softcopy & Hardcopy	Sekretaris	Kesubbag Program Internal	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/kemampuan-kegiatan/
b.	Pendampingan dan pelaksanaan program	Pemeringkat Insan Kegiatan Tahun 2017	2017	Softcopy & Hardcopy	Sekretaris	Kesubbag Program Internal	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/kemampuan-kegiatan/
c.	Target dan capaian program dan kegiatan	Target Capaian Kegiatan pada kegiatan Tahun 2017	2017	Softcopy & Hardcopy	Sekretaris	Kesubbag Program Internal	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/kemampuan-kegiatan/
d.	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Jadwal pelaksanaan kegiatan Tahun 2017	2017	Softcopy & Hardcopy	Sekretaris	Kesubbag Program Internal	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/kemampuan-kegiatan/
e.	Daftar anggaran	Daftar kegiatan APBD Tahun 2017	2017	Softcopy & Hardcopy	Sekretaris	Kesubbag Program Internal	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/dukumen-pelaksanaan-anggaran-dan/
f.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Kerangka Acuan Kerja Kegiatan kebidanan Tahun 2017	2017	Softcopy & Hardcopy	Sekretaris	Kesubbag Program Internal	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/kerangka-acuan-kerja-kak/

No	Judul	Kejelasan Isi Informasi (Perihal)	Waktu Pembuatan atau Informasi	Sejarah atau Perkembangan	Format Informasi yang Tersedia	Penyakit yang Mempengaruhi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Agenda Penting Bappeda								
Perencanaan RPPD Masa Pembangunan 2018								
A.	Rencana raker di pada GPP Kabupaten untuk TA 2017	Rencana Kerja Pembangunan Daerah	2017	5 tahun	Skripsi & Matriks	Sekretaris	Kantor Program	http://bappeda.jember.go.id/2016/kemangka-wan-kepp-44/
B.	Rencana pelaksanaan DAKT Agenda penting lainnya	Daftar proyek yang mengikuti kurasi / seminar	2016	5 tahun	Skripsi & Matriks	Sekretaris	Unitas dan Kepegawaian	http://bappeda.jember.go.id/2016/kepegawaian/
4. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda								
A.	Berkas informasi kinerja	dukumen perencanaan yang terorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3-5 tahun, subbagian dan kegiatan dan hasil yang telah dicapai dan yang akan dicapai dengan lingkungan strategis	2017	3 tahun	Skripsi & Matriks	Sekretaris	Kabupaten Program	Rencana Bappeda Pemas 2013-2018 http://bappeda.jember.go.id/2016/kepegawaian/
B.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda	2016	3 tahun	Skripsi & Matriks	Sekretaris	Kabupaten Program	http://bappeda.jember.go.id/2016/akuntabilitas/
C.	Laporan Realisasi Anggaran Publik	Realisasi dan implementasi dari BAPPEDA	2016	3 tahun	Skripsi & Matriks	Sekretaris	Kabupaten Program	http://bappeda.jember.go.id/2016/realisasi-anggaran-publik/
5. Pengawasan pelaksanaan barang dan jasa								
A.	Berkas perubahan barang dan jasa	Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang dan jasa yang akan dikelola oleh APBD/APBN Kerja Anggaran Daerah	2017	3 tahun	Skripsi & Matriks	Unitas Kepegawaian dan Kelembagaan	Kabupaten Program dan Kelembagaan	http://bappeda.jember.go.id/2016/realisasi-anggaran-publik/
B.	Perangkat lunak perkotaan	RUP (Rencana Umum Perkotaan)	2016	3 tahun	Skripsi & Matriks	Unitas Kepegawaian dan Kelembagaan	Kabupaten Program dan Kelembagaan	http://bappeda.jember.go.id/2016/realisasi-anggaran-publik/

B. WAJIB TERSEDIA SELIAP SAAT

No	Judul	Kejelasan Isi Informasi (Perihal)	Waktu Pembuatan atau Informasi	Sejarah atau Perkembangan	Format Informasi yang Tersedia	Penyakit yang Mempengaruhi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025	dukumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk selanjutnya hingga waktu 5 (lima) tahun	2005	20 tahun	Skripsi & Matriks	Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan	Kesatuan Penyusunan Program Dan Pembangunan	http://bappeda.jember.go.id/2016/kepegawaian/

No	Judul	Berkaitan ke Informasi (Pemer)	Tahun Pembuatan Dokumen	Jangka Waktu Penyusunan	Perihal Dokumen yang Tersebut	Profil para Penyusun Dokumen	Perangkat Desa/ Kabupaten/ Provinsi	Jenis Media yang Memuat Dokumen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2008-2013	Dokumen perencanaan pembangunan Jawa Tengah untuk periode 5 tahun (2008-2013) yang menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan tahunan (RKPD) Tahun 2008 s.d 2013. Dokumen RPJMD antara lain memuat : A. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan C. Rencana kegiatan pembangunan daerah D. Indikator Kinerja Pembangunan	2008	5 tahun	Software & Hardware	Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan	Kabupaten Penunjan Program Dan Pembangunan	http://appada.jatengprov.go.id/2014/04/perencanaan/
4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	Dokumen perubahan rencana pembangunan Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2008-2013 dan ketetapan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang berlaku (UU No. 16 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015). Selanjutnya perubahan RPJMD 2013-2018 tersebut dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKPD	2013	5 tahun	Software & Hardware	Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan	Kabupaten Penunjan Program Dan Pembangunan	http://appada.jatengprov.go.id/2014/04/perencanaan/
5.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2013	Dokumen perubahan rencana pembangunan Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2008-2013 dan ketetapan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang berlaku (UU No. 16 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015). Selanjutnya perubahan RPJMD 2013-2018 tersebut dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKPD	2013	5 tahun	Software & Hardware	Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan	Kabupaten Penunjan Program Dan Pembangunan	http://appada.jatengprov.go.id/2014/04/perencanaan/



No	Judul	Kategori Isi Informasi (Pernak)	Tahun Pembuatan Informasi	Jangka Waktu Pelaksanaan	Tipe Informasi yang Tersedia	Profil yang Menyusun Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Jawa Tengah 2013	Dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan berdasarkan pada RPJMD Tahun 2013-2018. RKPD antara lain memuat hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan, kerangka makro pendanaan, strategi dan prioritas pembangunan Tahun 2013, rencana program dan kegiatan serta target sasaran pembangunan yang akan dicapai Tahun 2013	2013	5 tahun	Softcopy & Hardcopy	Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan	Kesekretariatan Penyusunan Program Dan Pembangunan	http://dusapenda.jatengprov.go.id/2013/04/rkpd-perencanaan/
7.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2014	Dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan berdasarkan pada RPJMD Tahun 2013-2018. RKPD antara lain memuat hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan, kerangka makro pendanaan, strategi dan prioritas pembangunan Tahun 2014, rencana program dan kegiatan serta target sasaran pembangunan yang akan dicapai Tahun 2014	2013		Softcopy & Hardcopy	Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan	Kesekretariatan Penyusunan Program Dan Pembangunan	http://dusapenda.jatengprov.go.id/2014/04/rkpd-perencanaan/
8.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Jawa Tengah 2014	Dokumen penyusunan terhadap rencana pembangunan (SKPD) Tahun 2014 yang didasarkan pada kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan dan indikator kompleks	2014		Softcopy & Hardcopy	Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan	Kesekretariatan Penyusunan Program Dan Pembangunan	http://dusapenda.jatengprov.go.id/2014/04/rkpd-perencanaan/
9.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2015	Dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan berdasarkan pada RPJMD Tahun 2013-2018. RKPD antara lain memuat hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan, kerangka makro pendanaan, strategi dan prioritas pembangunan Tahun 2015, rencana program dan kegiatan serta target sasaran pembangunan yang akan dicapai Tahun 2015	2014		Softcopy & Hardcopy	Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan	Kesekretariatan Penyusunan Program Dan Pembangunan	http://dusapenda.jatengprov.go.id/2015/04/rkpd-perencanaan/



No	Judul	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Tanggal Pembuatan Informasi	Jangka Waktu Penyempurnaan	Format Informasi yang Tersebut	Kejadian yang Menghasilkan Informasi	Menyandang Jawab Pembuatan Informasi	Jenis Media yang Menuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Jawa Tengah 2015	Dokumen penyesuaian terhadap rencana pembangunan (RKPD) Tahun 2015 yang disesuaikan pada kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan dan lingkungan strategis	2015	5 tahun	Catatan & Naskah	Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kasubid Penyusunan Program Dan Pembangunan	http://bappenda.jatengprov.go.id/2015/04/04/peperaturan/
11.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2016	Dokumen perencanaan tahunan yang dibuat dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2013-2018. RKPD antara lain memuat hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan kerangka dasar pembangunan dan lingkungan strategis tahun 2016, rencana program dan kegiatan yang terintegrasi secara sistematis yang akan dicapai Tahun 2016	2016	5 tahun	Naskah	Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kasubid Penyusunan Program Dan Pembangunan	http://bappenda.jatengprov.go.id/2016/04/04/peperaturan/
12.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Jawa Tengah 2016	Dokumen penyesuaian terhadap rencana pembangunan (RKPD) Tahun 2015 yang disesuaikan pada kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan dan lingkungan strategis	2016	5 tahun	Catatan & Naskah	Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kasubid Penyusunan Program Dan Pembangunan	http://bappenda.jatengprov.go.id/2016/04/04/peperaturan/
13.	Relevansi Aksi Daerah Hibah Inovatif Development Goals (MDGs) Provinsi Jawa Tengah 2010-2015	Mempada komitmen global untuk memproduksi pencapaian bersama Prov Jateng bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/pesda untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan lingkungan pada akhir tahun 2015 dengan target akhir tercapainya kesejahteraan	2010	5 tahun	Catatan & Naskah	Aktivitas Masyarakat	Kasubid Penyusunan Program Dan Pembangunan	http://bappenda.jatengprov.go.id/2016/04/04/peperaturan/

No	Judul	Kategori Isi Informasi (Perihal)	Waktu Pembuatan Informasi	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Format Informasi yang Tersedia	Pejabat yang Menanggung Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Rencana Aksi Daerah Pengurangan Gas Emisi Rumah Raca Provinsi Jawa Tengah 2010-2020	<p>a) Mengetahui RAGI emisi di Jawa Tengah dengan tahun dasar 2010 di sektor pertanian, kehutan dan energi dan terpadu sampai 2020</p> <p>b) Membuat rencana aksi pemutihan emisi tahun 2020</p>	2010	5 tahun	Softcopy & Hardcopy	Kaori Instruktur dan Pengembangan Wilayah	Kasubid Sektur Daya Alam dan ETLH	http://pawanda.jatengprov.go.id/2016/06/04/rencanaaksi/
15.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah 2010-2020	<p>Penduan & arahan serta standar tagline nasional</p> <p>Pemerintahan, lembaga/organisasi masyarakat sipil dan swasta</p> <p>Forum Nasional Kabupaten/Kota</p> <p>Persama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>memerintahkan untuk melakukan perubahan dengan cara:</p> <p>Dukung produk yang bernilai gizi yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJPD, RPJMD, Perencanaan ruang, perubahan norma wilayah Kabupaten</p> <p>Dukung Perencanaan yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan</p>	2010	5 tahun	Softcopy & Hardcopy	Kaori Pengembangan Wilayah	Kasubid Sektur Daya Alam dan Pertanian	http://bapenda.jatengprov.go.id/2016/06/04/rencanaaksi/
16.	Rencana Aksi Daerah Wilayah Perikanan Jawa Tengah 2010-2020	<p>Perencanaan ruang, perubahan norma wilayah Kabupaten</p> <p>Dukung Perencanaan yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan</p>	2010	5 tahun	Softcopy & Hardcopy	Kaori Pengembangan Wilayah	Kasubid Pengembangan Wilayah	http://bapenda.jatengprov.go.id/2016/06/04/rencanaaksi/
17.	Rencana Strateis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	<p>Perencanaan yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan</p> <p>yang juga dicakup dalam kurun waktu 5 tahun selubung dengan target dan fungsi SKPD serta dasar dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis</p>	2013	5 tahun	Softcopy & Hardcopy	Sebestans	Kasubag Program	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/06/04/rencanaaksi/
18.	Rencana Kerja Tahunan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015	<p>dokumen untuk mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>	2015	5 tahun	Softcopy & Hardcopy	Sebestans	Kasubag Program	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/06/04/rencanaaksi/

No	Judul	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Tahun Pembuatan Informasi	Jangka Waktu Pemertahanan	Kemutakhiran yang Terjadi	Prosedur yang Menghasilkan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Situs Media yang Memuat Informasi
19.	Rencana Kerja Tahunan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	Dokumen untuk mendukung kelengkapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2016	5 tahun	Salinan & Hardcopy	Sekretaris	Kesekretariatan	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/04/bappeda.html
20.	Rencana Kerja Tahunan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	Dokumen untuk mendukung kelengkapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2017	5 tahun	Salinan & Hardcopy	Sekretaris	Kesekretariatan	http://bappeda.jatengprov.go.id/2017/04/bappeda.html
21.	Daftar Aset dan Inventarisasi	Daftar Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	2016	5 tahun	Salinan & Hardcopy	Sekretaris	Kesekretariatan	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/04/daftar-aset-dan-inventarisasi.html
22.	Jurnal Penelitian Penelitian Kualitatif (Jurnal Litba (JQ-NDV) Provinsi Jawa Tengah	Dokumentasi hasil dari penelitian yang dilaksanakan di Jawa Tengah meliputi peneliti lain yang menghasilkan artikel pada 5 Jurnal Tengah (Jurnal Litba (JQ-NDV), Lembaga Lembaga Penelitian, analisis proses, dan/atau tahapan penelitian)	2015	5 tahun	Salinan & Hardcopy	Bidang Kolaborasi dan GPP Litba	Kepala Bidang Kelengkapan dan Kelengkapan GPP Litba	http://www.litba.jatengprov.go.id/

C. WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERKA

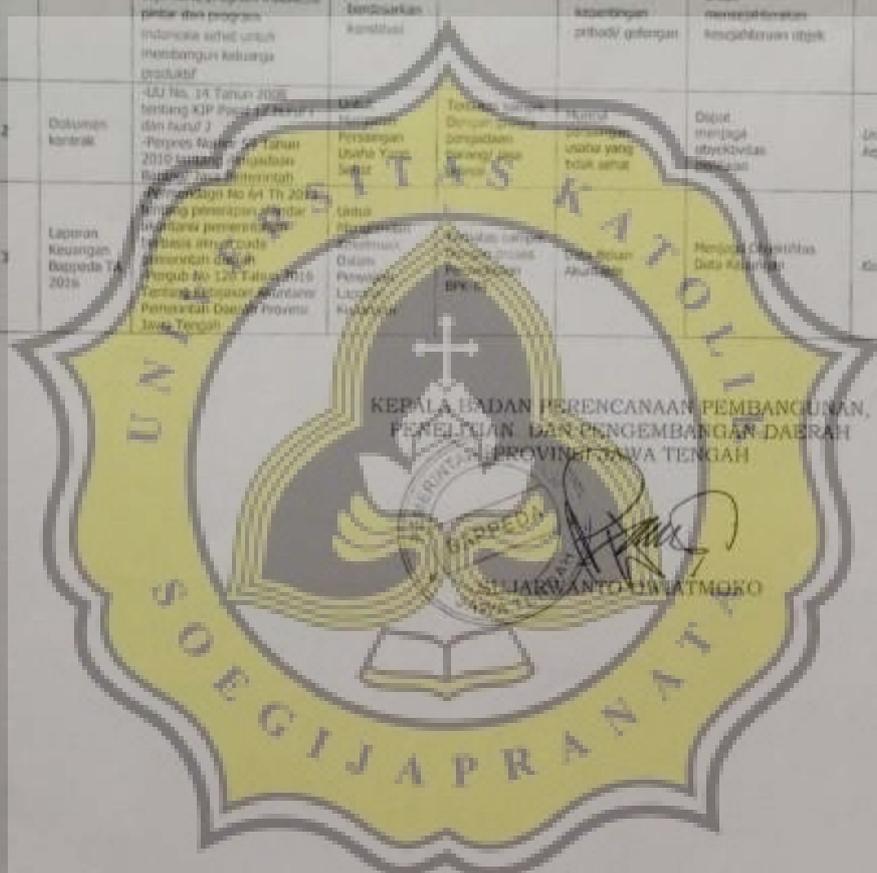
No	Judul	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Jangka Waktu Pemertahanan	Waktu Terakhir Pemertahanan	Tingkat Kemutakhiran yang Terjadi	Prosedur yang Menghasilkan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Situs Media yang Memuat Informasi
1.	Prosedur keadaan darurat	Prosedur keadaan darurat di gedung BAPPEDA Prov.Jateng	5 tahun	Salinan & Hardcopy	Salinan & Hardcopy	Kesekretariatan dan Kesekretariatan	Kesekretariatan	http://bappeda.jatengprov.go.id/2016/04/prosedur-keadaan-darurat.html

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BAPPEDA
JAWA TENGAH
SRIWANTO DWIATMOKO

II. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Alasan Informasi Diakses/Dikecualikan	Waktu Perhitungan Informasi	Klasifikasi		Pengecualian
					Apakah Itu Informasi Dibuka	Apakah Itu Informasi Dibuka	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Data Tugas Kesejahteraan Masyarakat	-Perpres No. 166 Tahun 2014 tentang Program Kecepatan Penanggulangan Kemiskinan -Instruksi Presiden No. 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program lapangan keluarga sejahtera, program Indonesia pintar dan program Indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan kondisi	Tidak terdapat	Dikecualikan untuk jembatannya data by name by address untuk kepentingan pribadi/ keluarga	Melindungi data dan pihak - pihak yang tidak berpartisipasi, yang bukan bertujuan untuk memfasilitasi dan kesejahteraan orang	Tidak
2	Dokumen kontrak	-UU No. 24 Tahun 2008 tentang KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan pasal 2 -Perpres No. 166 Tahun 2014 tentang Program Kecepatan Penanggulangan Kemiskinan	Pengawasan Usaha Yang Sehat	Terdapat untuk keperluan pelayanan publik yang tepat	Konsep pelayanan yang baik	Dapat menjadi etyckivitas pelayanan	Umum Kecualikan
3	Laporan Keuangan Bappeda TA 2015	-Peraturan No 61 Th 2014 tentang pelaksanaan dan inisiatif pemeringkatan berbasis akuntabilitas pemerintah daerah -Perpres No 120 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Untuk Memastikan Pemenuhan Dalam Pemenuhan Laporan Keuangan	Untuk dapat diakses oleh masyarakat umum	Dapat diakses oleh masyarakat umum	Mencapai Akuntabilitas Data Kelembagaan	Kuangan





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846
Fax. (024) 8318890 SEMARANG 50136

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.221/07643

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi dipangan, perlu Penetapan Daftar Informasi Publik setiap tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4943);
4. Undang-Undang (2)

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/MPAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor :800/00956 tanggal 31 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Daftar Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dalam diktum **KESATU** terdapat atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang diecualikan.
- KETIGA** : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT** : Informasi yang diecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Juli 2017

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBAHTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. SANCOYO HADI, M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. BPD Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/076-93 Tanggal : 12 Juli 2017

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

I. INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi tentang Profil Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa Tengah						
a.	Kedudukan/domisilil : Jl. Stadion selatan No. 1 Semarang Telp. 024. 8319421, 8415813, 8318846 Fax (024) 8318890 Web, bkd.jatengprov.go.id, email : bkd@jatengprov.go.id Twitter : @bkdjatengprov Facebook : Bkd Prov Jateng. BKD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pergub Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ka. BKD	Kasubbag Umpep	2016	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
b.	VISI : "Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Unggul" MISI : 1. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan;	Ka. BKD	Kasubbag Umpep	2016	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD

2. Pelaksanaan mutasi (5)

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguesal Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Pelaksanaan mutasi kepegawalan yang akurat dan terukur; 4. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja; 5. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai; 6. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan yang akurat dan terintegrasi; 7. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawalan						
c.	Rencana Strategis (Renstra) Renstra Badan Kepegawalan Daerah Tahun 2013 – 2018 merupakan Dokumen Rencana Strategis diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawalan Daerah serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.	Ka. BKD	Kasubbag Umpeg	2013	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
d.	Struktur Organisasi dan Profil Badan Kepegawalan Daerah	Ka. BKD	Kasubbag Umpeg	2013	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD

Susunan Organisasi (6)

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Susunan Organisasi BKD Prov. Jateng adalah sbb: 1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Bidang Perenc dan pengemb Pegawai 4. Bidang Mutasi 5. Bidang Pembinaan & Kesejahteraan Peg 6. Bidang Informasi Kepegawaian 7. UPT Kompetensi Peg 8. Kelompok Jabatan Fungsional						
e.	Sumberdaya Manusia yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Total PNS = 165 S2 = 41, S1 = 70, D3 = 13 SLTA = 34 SLTP = 3 SD = 4	Ka. BKD	Sabudag Umpeg	2013	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
f.	Kedudukan, Tugas, Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jateng Kedudukan: 1. Badan merupakan unsur pemerintah urusan pemerintahan di Bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah; 2. Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.						

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Meruat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawalan;2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawalan;3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawalan;4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawalan; dan;						

5. Pelaksanaan (8)

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang mengesal Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	6. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan, 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.						
g.	Profil Pejabat Berisi daftar nama Pejabat	Ka. BKD	Kasubag Umpeg	2013	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
h.	LHKPN Berisi Laporan Harat Kekayaan Kepala BKD yang telah divalidasi oleh KPK	Ka. BKD	Kasubag Umpeg	2013	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
2.	Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah						
a.	Nama Program dan Kegiatan, Terdaftar..... kegiatan yang dibayai melalui APBD Prov. Jateng TA 2017	Ka. BKD	Sekretaris	2017	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
b.	Penanggung Jawab dan Pelaksana Program	Ka. BKD	Sekretaris	2017	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
c.	Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Ka. BKD	Kasubag Program	2017	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
d.	Jadwal Pelaksanaan Program Kegiatan	Ka. BKD	Kasubag Program	2017	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
e.	Nilai Anggaran	Ka. BKD	Kasubag Program	2017	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
f.	Agenda Penting BKD						
	Rencana Rakor, dll pada SKPD tahun berjalan	Ka. BKD	Kasubid Pengampu	2017	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD
	- Rencana Pelaksanaan Dilat	Ka. BKD	Kasubid Pengampu	2017	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD
	- Agenda Penting lainnya	Ka. BKD	Kasubid Pengampu	2017	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang mengesal Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawain Daerah						
a.	Ringkasan Informasi Kinerja Berisi progres target dan realisasi pelaksanaan kegiatan setiap bulannya TA 2017	Ka. BKD	Kasubag Program	2017	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD
b.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA 2016 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun sagar dalam mencapai tujuan /sasaran strategis Instansi.	Ka. BKD	Kasubag Program	2016	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD
4.	Laporan Layanan Informasi Publik, Menguraikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik tahun 2016 maupun laporan bulanan akses pelayanan publik tahun 2017	Ka. BKD	Kasubag Program	2017	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun setelah ditetapkan	Meja Informasi
5.	Informasi peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh BKD	Ka. BKD	Kasubag Umpeg	2016	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun setelah ditetapkan	Website BKD
6.	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa TA 2017	Ka. BKD	Kasubag Program	2017	Soft Copy dan Hard Copy	Selama berlaku	Website BKD & Papan pengumuman
1)	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Ka. BKD	KPA	2017	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD & Papan pengumuman
2)	Pengumuman proses Pengadaan	Ka. BKD	KPA	2017	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD & Papan pengumuman

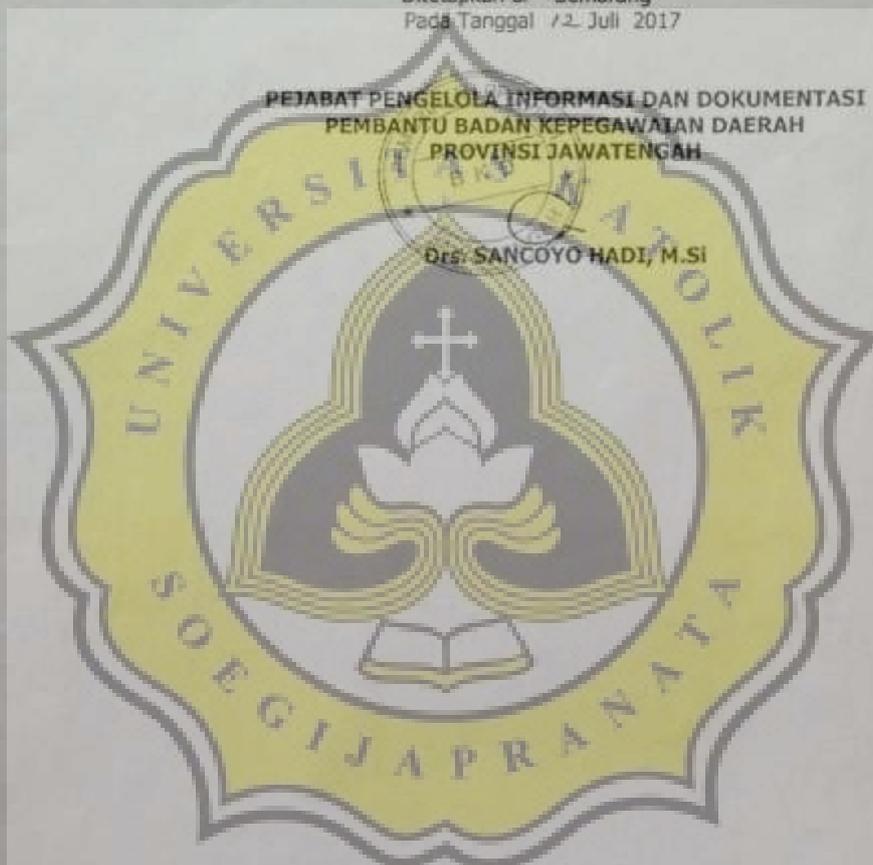
II. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawalan	Ka. BKD	Kasubag Umpeg	Setiap ada perubahan	Softcopy dan hard copy	Selama berlaku	Website BKD
b.	Rencana Strategis	Ka. BKD	Kasubag Program	Setiap Awal Periode	Softcopy dan hard copy	5 Tahun	Website BKD
c.	Rencana Kerja Tahunan	Ka. BKD	Kesubag Program	Setiap Awal Periode	Softcopy dan hard copy	2 Tahun	Website BKD
d.	Informasi Tes CPNS	Ka. BKD	Kepala Bidang Madya	Sesuai Kebijakan	Softcopy dan hard copy	Selama Berlaku	Website BKD dan Papan Pengumuman
e.	Informasi UKKPI	Ka. BKD	Kabid Perenc. & Pengem. Pegawai	Sesuai Kebijakan	Softcopy dan hard copy	Selama Berlaku	Website BKD dan Papan Pengumuman
f.	Informasi Ujian Dasar	Ka. BKD	Kabid Perenc. & Pengem. Pegawai	Sesuai Kebijakan	Softcopy dan hard copy	Selama Berlaku	Website BKD dan Papan Pengumuman
g.	Uji Peningkatan Pendidikan	Ka. BKD	Kabid Perenc. & Pengem. Pegawai	Sesuai Kebijakan	Softcopy dan hard copy	Selama Berlaku	Website BKD dan Papan Pengumuman
h.	Informasi tentang Talent Scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, meliputi : Pengumuman, syarat dan ketentuan, tahapan, waktu dan hasil (talent Pool)	Kepala Badan	Kabid Perenc. & Pengem. Pegawai	Setiap Pelaksanaan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
i.	Informasi tentang Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT, baik dipusat maupun di daerah, meliputi : Pengumuman, syarat dan ketentuan, tahapan, waktu, dan uraian jabatan yang akan diisi	Kepala Badan	Kabid Perenc. & Pengem. Pegawai	Setiap Pelaksanaan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD

j. Informasi tentang Impassing (11)

j.	Informasi tentang Inpassing/Penyesuaian Jabatan fungsional, meliputi : Pengumuman, syarat dan ketentuan, dan waktu pelaksanaan	Kepala Badan	Kabid Perenc & Pengem Pegawai	Setiap Pelaksanaan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
h.	Informasi Profil PNS	Ka. BKD	Kabid INKA	Setiap Tahun	Softcopy dan hard copy	5 Tahun	Website BKD

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 12 Juli 2017



FORMULIR SCAN ANTI PLAGIARISME

6.12.20

Nama : ELVA VISOLADILLA INDI SCORVIR

Alamat email : elvavisoladilla@yahoo.com

Fak. / Prodi : FHK IKM NIM:

berupa(TESIS, TUGAS AKHIR, PROPOSAL, SKRIPS, SUMMARY, LAPORAN KERJA PRAKTEK)

dengan judul : KESTERAPAN PAKETAN INFORMATIKA

JATENG BERDAYAKAN REKI NOPM TAHUN 2010

DI TAHUN 2017

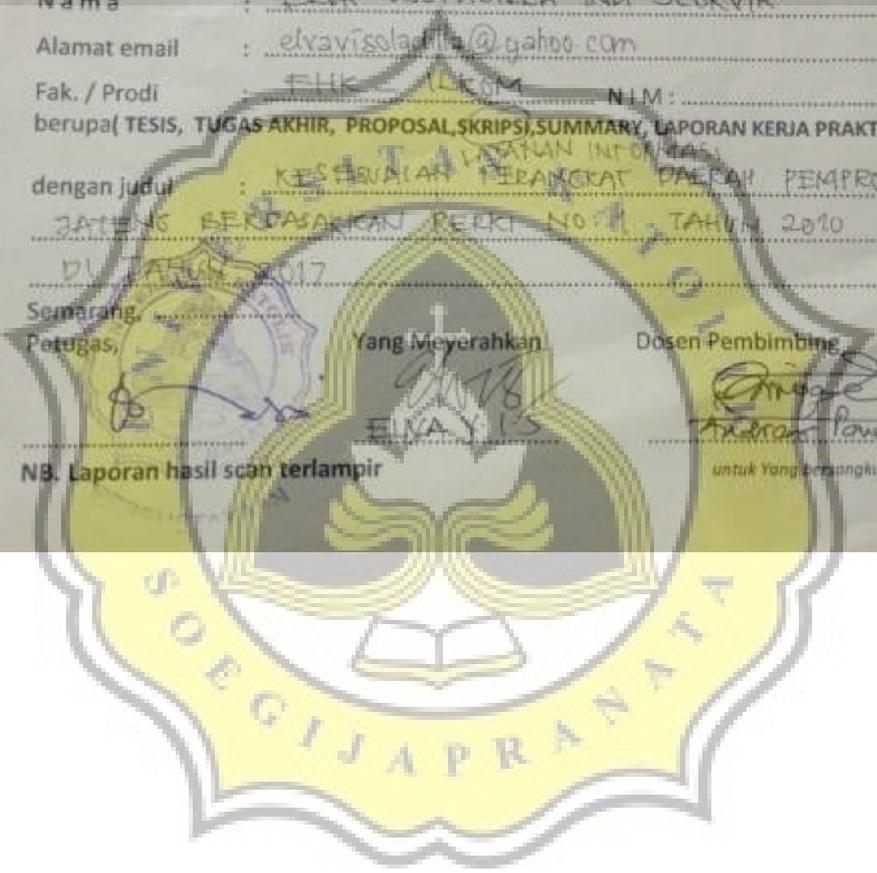
Semarang,

Petugas, Yang Meyerahkan Dosen Pembimbing

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*
ELVA Y I S Anuran Pandiayogan

NB. Laporan hasil scan terlampir

untuk Yang bersangkutan *



Programme *Arson*

19/3/19

FORMULIR SCAN ANTI PLAGIARISME

6.2% *Ar*

Nama : *ELVA VISOTADILLA Inpi Scorevir*

Alamat email : *elvisoladilla@yahoo.com*

Fak. / Prodi : *FEHK - ILLKOM* NIM : *14. M1. 0013*

berupa (TESIS, TUGAS AKHIR, PROPOSAL, SKRIPSI, SUMMARY, LAPORAN KERJA PRAKTEK)

dengan judul : *KESSESUAIAN PERANGKAT DAERAH PENARBUK*

..... *JATENG BERDASARKAN PERKI NO. 1 TAHUN 2010*

D1 TAHUN 2017

..... Semarang, *08 JANUARI 2019*

Petugas, Yang Meyerahkan

Dosen Pembimbing

Ar

ELVA Y. LIS

Ar
Arson Panjajayan

untuk Yang bersangkutan *

NB. Laporan hasil scan terlampir